



Evaluasi Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Darat: Analisis Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Efektivitas Layanan

Vianca Naila Chandra¹, Remi Kasmizar² Afrijal³

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

³ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

E-mail: viancachandra17@gmail.com, remykasmizar@gmail.com, afrijal@usk.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 18-5-2026

Diterima: 26-06-2026

Diterbitkan: 30-06-2026

Keywords:

Collaborative Governance;
Land Transportation ;
Service Effectiveness

Kata Kunci:

Collaborative Governance;
Transportasi Darat ;
Efektivitas Pelayanan



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

Land transportation is a public service sector that requires the involvement of various parties in its management process. The complexity of transportation problems makes it impossible for the government to work independently, thus requiring a collaborative governance approach to create more effective and sustainable services. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in land transportation management through a study of the concept of collaboration, the role of stakeholders, service effectiveness, implementation challenges, and strategies for improving collaboration. The study used a library research method by utilizing various literature sources in the form of scientific journals, books, articles, and relevant supporting documents. The results show that collaborative governance can improve coordination and synergy among stakeholders, such as the government, the private sector, the community, and academics in transportation management. However, its implementation still faces various obstacles, such as differences in interests, weak coordination, limited participation, and suboptimal use of information technology. Therefore, it is necessary to strengthen communication, build trust, strengthen institutions, and increase stakeholder participation so that land transportation services can run more effectively, inclusively, and sustainably.

Abstrak

Transportasi darat merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaannya. Kompleksitas permasalahan transportasi menyebabkan pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri sehingga diperlukan pendekatan collaborative governance untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam pengelolaan transportasi darat melalui kajian mengenai konsep kolaborasi, peran pemangku kepentingan, efektivitas pelayanan, tantangan implementasi, serta strategi peningkatan kolaborasi. Penelitian menggunakan metode

studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam penyelenggaraan transportasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan, lemahnya koordinasi, keterbatasan partisipasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, pembangunan kepercayaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi stakeholder agar pelayanan transportasi darat dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Keberadaan sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan transportasi darat masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kemacetan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pelayanan, kurang optimalnya aksesibilitas bagi kelompok tertentu, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama.

Perkembangan paradigma administrasi publik mendorong lahirnya konsep collaborative governance sebagai pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan stakeholder lainnya dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance dipandang sebagai bentuk tata kelola yang mampu menciptakan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan persoalan publik secara kolektif. Melalui pendekatan ini, setiap stakeholder memiliki peran sesuai kapasitas dan kewenangannya sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam sektor transportasi darat, collaborative governance menjadi penting karena kompleksitas permasalahan transportasi berkaitan dengan berbagai aspek, seperti pembangunan wilayah, lingkungan, ekonomi, dan pelayanan publik. Keberhasilan penyelenggaraan transportasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan stakeholder dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan pembuat kebijakan, sektor swasta mendukung pembiayaan dan penyediaan layanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas pelayanan publik. Kolaborasi antar pihak tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan transportasi serta menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pada sektor transportasi. Pendekatan kolaboratif dinilai mampu memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan partisipasi stakeholder, serta mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, implementasi collaborative governance dalam pengelolaan transportasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar stakeholder, keterbatasan partisipasi, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses kolaborasi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas pelayanan transportasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Metode

Mekanisme pengkajian yang digunakan dalam penulisan adalah metode studi kepustakaan atau (*Library Research*). Sutrisno Hadi:1990, menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan berasal dari data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menuliskan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:140) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis atau referensi lain. Teknik analisis data dilakukan menganalisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi pola, tema, serta faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan antikorupsi di daerah.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, membaca sumber data, menganalisa data, mengolah catatan penelitian, dan menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang diterapkan. Sumber data yang dipergunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur dimulai dari jurnal, laporan hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku yang relevan, data ilmiah, beserta artikel laporan

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Collaborative Governance dalam Transportasi Darat

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan pentingnya hubungan kerja sama antar pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu permasalahan atau kegiatan tertentu. Dalam pendekatan ini, setiap aktor diposisikan sebagai mitra yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui kesepakatan

yang saling menguntungkan. Pola kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan. Perkembangan konsep collaborative governance tidak terlepas dari perubahan paradigma pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif dan inklusif. Pemerintah tidak lagi menjalankan pelayanan publik secara mandiri, tetapi mulai membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat karena pendekatan kolaboratif dinilai lebih mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Yasintha, 2020).

Dalam sektor transportasi, berbagai persoalan pelayanan sering kali muncul akibat lemahnya koordinasi dan kerja sama antar stakeholder. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi, khususnya transportasi darat, sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap pihak dalam membangun sinergi dan menjalankan perannya secara terpadu. Collaborative governance dipahami sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik (Adjie, 2023).

Pendekatan collaborative governance juga menempatkan stakeholder tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan kolektif yang dibangun melalui partisipasi bersama, sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab terhadap hasil kebijakan tersebut. Kehadiran collaborative governance dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan pelayanan publik yang sulit diselesaikan oleh satu institusi saja. Keterbatasan sumber daya pemerintah serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor transportasi (Dewi, 2019).

Collaborative governance juga dapat dipahami sebagai proses pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkatan secara konstruktif untuk mencapai kepentingan bersama. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mewujudkan hasil yang tidak dapat dicapai apabila hanya dilakukan oleh satu organisasi secara individual. Dalam praktiknya, kolaborasi menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan publik melalui keterlibatan berbagai organisasi yang memiliki kepentingan terhadap isu tertentu. Setiap pihak berupaya menemukan solusi bersama agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara kolektif.

Keberhasilan collaborative governance dapat dilihat melalui beberapa tahapan penting, seperti dialog langsung antar stakeholder, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, terbentuknya pemahaman bersama, serta munculnya hasil-hasil awal yang positif. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa collaborative governance bukan sekadar bentuk kerja sama biasa, melainkan sebuah

proses yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

B. Peran Pemangku Kepentingan

Pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan transportasi tidak dapat dilakukan secara individual oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan transportasi. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif (Satyadharma dan Susanti, 2024).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan transportasi karena bertindak sebagai regulator dan pengambil kebijakan. Peran pemerintah diwujudkan melalui penyusunan regulasi, pengembangan kebijakan transportasi, pengendalian tata ruang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem transportasi. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan serta memberikan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan transportasi agar sistem yang dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan (Dwiyanto, 2022).

Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh fungsi tersebut secara mandiri. Dalam praktiknya, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat diperlukan sejak tahap awal penyusunan kebijakan hingga proses evaluasi program transportasi. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih responsif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Partisipasi berbagai pihak juga dapat memperkuat efektivitas kebijakan karena setiap stakeholder memiliki pengalaman, sumber daya, dan perspektif yang berbeda dalam mendukung pengembangan transportasi (Adji, 2023).

Sektor swasta memiliki kontribusi penting terutama dalam mendukung pembiayaan dan implementasi pembangunan transportasi. Keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan kerja sama dengan pihak swasta menjadi salah satu solusi dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi. Bentuk kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership) maupun program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pengembangan transportasi berkelanjutan. Kehadiran sektor swasta juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan transportasi kepada masyarakat (Prastiyo, 2019).

Selain pemerintah dan sektor swasta, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sistem transportasi. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pengguna layanan transportasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan transportasi. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transportasi berkelanjutan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta keterlibatan dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas transportasi secara bertanggung jawab

Di samping itu, kelompok masyarakat seperti akademisi dan komunitas turut memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem transportasi melalui kajian ilmiah, penelitian, serta inovasi yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Masukan dari akademisi dan komunitas menjadi penting karena dapat membantu pemerintah dalam memahami kondisi lapangan secara lebih komprehensif sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, keberhasilan sistem transportasi sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun sinergi dan kerja sama yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas akan menciptakan sistem transportasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara menyeluruh (Sutandi, 2025).

C. Efektivitas Pelayanan Transportasi

Efektivitas layanan transportasi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu program atau pelayanan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pelayanan publik, efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu layanan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Penilaian efektivitas pelayanan transportasi umumnya mencakup beberapa aspek, seperti pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran pelayanan, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat setelah program dilaksanakan (Hardiansyah, 2018).

Dari aspek pemahaman program, efektivitas layanan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap sistem pelayanan yang dijalankan. Aparatur pelaksana pada umumnya telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih terarah. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan transportasi secara menyeluruh, baik terkait prosedur penggunaan maupun manfaat layanan yang disediakan. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan layanan belum berjalan secara maksimal dan berdampak terhadap efektivitas program secara keseluruhan (Rahman, 2020).

Selain itu, efektivitas layanan juga ditentukan oleh ketepatan sasaran program. Suatu pelayanan dapat dikatakan efektif apabila mampu menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi target utama kebijakan. Dalam pelayanan transportasi publik, sasaran layanan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun program transportasi telah memberikan manfaat dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, masih terdapat kelompok sasaran yang belum memperoleh akses pelayanan secara optimal akibat keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung yang tersedia (Kurniawan dan Ma'ruf, 2021).

Ketepatan waktu juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan transportasi. Pelayanan transportasi publik seharusnya berjalan sesuai jadwal dan standar pelayanan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering terjadi keterlambatan layanan akibat keterbatasan armada, kondisi lalu lintas, dan tingginya jumlah pengguna. Keterlambatan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan transportasi yang diberikan (Setiawan, 2019).

Efektivitas pelayanan transportasi juga dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program berhasil dicapai. Tujuan utama penyelenggaraan transportasi publik adalah menciptakan layanan yang aman, nyaman, mudah diakses, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat secara merata. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan pengguna transportasi publik. Akibatnya, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi kelompok pengguna dengan kebutuhan khusus (Nugroho dan Putri, 2022).

Secara keseluruhan, efektivitas layanan transportasi dalam program ini dinilai belum optimal. Dari beberapa aspek yang digunakan sebagai indikator, hanya aspek perubahan nyata yang menunjukkan hasil yang efektif, sedangkan aspek lainnya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan program (JANE, 2022).

D. Tantangan Dalam Implementasi Collaborative Governance

Implementasi collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pengelolaan transportasi melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, sehingga diperlukan integrasi yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara terpadu. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan transportasi berpotensi berjalan secara parsial dan kurang efektif dalam

menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam collaborative governance adalah kompleksitas dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan aspek lingkungan, tata ruang wilayah, pembangunan ekonomi, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan transportasi membutuhkan koordinasi intensif antar lembaga agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan tidak saling bertentangan antar sektor.

Selain itu, perbedaan kepentingan antar stakeholder juga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Setiap aktor memiliki tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan peran dan kepentingannya masing-masing. Pemerintah cenderung berorientasi pada pelayanan publik dan regulasi, sektor swasta lebih menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, sedangkan masyarakat mengutamakan aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali menyebabkan proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan bersama.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi seluruh stakeholder dalam proses collaborative governance. Pada praktiknya, tidak semua pihak mampu terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi, serta minimnya akses terhadap forum pengambilan keputusan. Akibatnya, proses kolaborasi belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang inklusif dan partisipatif.

Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi collaborative governance di sektor transportasi. Perubahan pola mobilitas masyarakat, kemajuan teknologi transportasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan yang cepat dan efisien menuntut pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mampu beradaptasi secara cepat. Dalam sistem kolaboratif, proses adaptasi tersebut sering kali menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal juga menjadi kendala dalam mendukung proses kolaborasi. Padahal, teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengumpulan data, koordinasi antar lembaga, monitoring pelayanan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan proses komunikasi dan pertukaran informasi antar stakeholder menjadi kurang efektif sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi yang diberikan kepada masyarakat.

Secara umum, tantangan implementasi collaborative governance dalam sektor

transportasi menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun koordinasi, menyatukan kepentingan, meningkatkan partisipasi, serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan adanya penguatan komunikasi, dukungan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas stakeholder, collaborative governance diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Satyadharma dkk, 2024).

E. Strategi Peningkatan

Strategi peningkatan collaborative governance dalam pengelolaan transportasi dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi antar aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui dialog tatap muka menjadi sarana penting dalam membangun kesepahaman antar stakeholder. Melalui komunikasi yang intensif, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta kepentingannya secara terbuka sehingga potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalisir. Dialog yang berlangsung secara aktif juga mampu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan partisipatif, sehingga hubungan kerja sama antar stakeholder dapat berjalan lebih efektif.

Selain komunikasi, pembangunan kepercayaan menjadi strategi utama dalam memperkuat collaborative governance. Kepercayaan antar aktor tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi berkembang melalui interaksi yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pihak perlu menunjukkan komitmen, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kerja sama. Kepercayaan yang kuat akan menciptakan hubungan kolaboratif yang lebih stabil, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan maupun konflik yang pernah terjadi antar stakeholder.

Komitmen terhadap proses kolaborasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan collaborative governance. Setiap aktor harus memiliki kesediaan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Komitmen tersebut tercermin melalui sikap saling menghargai, adanya rasa tanggung jawab bersama, serta kesadaran bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kontribusi seluruh pihak. Hubungan yang saling mendukung dan adanya penghargaan terhadap peran masing-masing aktor dapat memperkuat keberlanjutan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Pemahaman bersama antar stakeholder juga menjadi strategi penting dalam mendukung efektivitas collaborative governance. Kesamaan visi, misi, dan tujuan diperlukan agar setiap pihak memiliki arah kebijakan yang selaras. Penyatuan persepsi antar aktor dapat mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kolaborasi. Dengan adanya pemahaman bersama, proses koordinasi menjadi lebih mudah

dilakukan dan setiap stakeholder dapat menjalankan perannya secara lebih optimal.

Strategi lainnya adalah menciptakan hasil-hasil awal atau keberhasilan kecil dalam proses kolaborasi. Keberhasilan awal tersebut dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan dan motivasi stakeholder untuk terus mempertahankan kerja sama yang telah dibangun. Hasil yang terlihat secara nyata juga dapat memperkuat keyakinan setiap pihak bahwa kolaborasi yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

Penguatan collaborative governance juga dapat dilakukan melalui penetapan tujuan bersama yang jelas. Tujuan yang disepakati secara kolektif menjadi dasar bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan proses kolaborasi. Kejelasan tujuan akan membantu setiap pihak tetap fokus terhadap arah kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Tanpa tujuan yang jelas, proses kolaborasi berpotensi mengalami hambatan karena masing-masing pihak memiliki orientasi yang berbeda.

Hubungan yang saling menguntungkan antar stakeholder juga menjadi strategi penting dalam collaborative governance. Setiap aktor perlu memberikan kontribusi berupa sumber daya, informasi, maupun dukungan sesuai kapasitasnya masing-masing. Dalam proses tersebut, seluruh pihak juga harus memperoleh manfaat dari kerja sama yang dijalankan. Pertukaran sumber daya dan informasi secara seimbang akan memperkuat hubungan antar stakeholder dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan transportasi.

Lingkungan yang mendukung turut mempengaruhi keberhasilan collaborative governance. Kondisi kerja yang kondusif serta kepemimpinan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan kolaboratif. Pemimpin memiliki peran dalam membangun komunikasi, menjaga koordinasi, serta memastikan seluruh pihak tetap terlibat secara aktif dalam proses kerja sama.

Selain itu, penguatan sistem kelembagaan juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan collaborative governance. Kelembagaan yang jelas, termasuk aturan, prosedur, dan mekanisme partisipasi, dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan kolaborasi. Sistem kelembagaan yang terbuka dan inklusif akan menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh stakeholder untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan transportasi.

Strategi lainnya adalah meningkatkan keterbukaan informasi dan akses terhadap sumber daya. Transparansi dalam pertukaran informasi menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan kerja sama yang efektif dan terpercaya. Setiap stakeholder perlu memiliki akses yang setara terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan agar proses kolaborasi dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya keterbukaan dan distribusi sumber daya yang adil, hubungan kolaboratif akan sulit berkembang secara

berkelanjutan.

Kesimpulan

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan transportasi darat. Pendekatan ini menjadi penting karena permasalahan transportasi memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Kolaborasi antar aktor dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan untuk menciptakan pelayanan transportasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengarah kebijakan, sektor swasta mendukung pembiayaan dan implementasi layanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas pelayanan publik. Efektivitas layanan transportasi dapat dilihat dari kemampuan program dalam mencapai tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelayanan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Meskipun beberapa program telah memberikan manfaat positif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan armada, kurangnya pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar stakeholder.

implementasi collaborative governance juga menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan partisipasi, kompleksitas koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan komunikasi, pembangunan kepercayaan, peningkatan komitmen bersama, penguatan kelembagaan, serta keterbukaan informasi agar proses kolaborasi dapat berjalan lebih efektif. Dengan penerapan collaborative governance yang baik, pengelolaan transportasi darat diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Adji, I., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., dan Rowa, H. (2023). Collaborative governance in the management of transportation modes in DKI Jakarta Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 747–758. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.56440>
- Dewi, R. K. (2019). Collaborative governance dalam pengelolaan pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–56.
- Dwiyanto, A. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Fatman, J. H., Nurlinah, & Syamsu, S. (2023). *Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 9(1).
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- JANE. (2022). Efektivitas pelayanan transportasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 88–97.
- Kurniawan, R., dan Ma'ruf, M. F. (2021). Efektivitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–67.
- Nugroho, A., dan Putri, D. A. (2022). Analisis efektivitas pelayanan transportasi publik berbasis aksesibilitas masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 101–112.
- Prastiyo, D. A. (2019). Collaborative governance and infrastructure development in Indonesia: A review. *Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 30–35. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2019.004.01.6>
- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative governance: Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 173–184.
- Rahman, F. (2020). Pemahaman masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 70–81.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. (2016). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satyadharma, M., dan Susanti, N. (2024). Collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi sektor darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi*, 2(1), 1–14.
- Setiawan, D. (2019). Ketepatan waktu pelayanan transportasi publik dan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat. *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 40–52.
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sutandi, A. C. (2025). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan transportasi berkelanjutan. *Jurnal Infrastruktur dan Transportasi*, 3(1), 12–24.
- Wibowo, A. N. F. A. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik (Study BRT Trans Semarang). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 1–14. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.970>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>